

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 9, No.1, Juni 2023

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 9, No. 1 Juni 2023

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.,M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
- Sekretaris Redaksi** : Nursaripati Risca, S.Pd
- Dewan Redaksi** : Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., M.T.
Zakiah, SE., Ak
Surya Rahmah Labetubun, S.Kom
- Redaktur Ahli** : Paisal, S.H.
Amir Alboneh, S.Ag
Muhammad Afhan, SE
Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si
Muhammad Irfan Syuhudi, S.Sos., M.Si
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag
Dr. Abdul Muhaimin, M.Ed
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
Sitti Arafah, S.Ag., M.A.
- Sekretariat** : Nasri, S.Sos
Husnul, S.Pd
Burhanuddin
Bohari
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun terbit, dan halaman, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

AHMAD BASO

**SATU ABAD NAHDLATUL ULAMA, SATU ABAD PENGHADIRAN WALI
SONGO: MELACAK AKAR-AKAR PEMIKIRAN KEISLAMAN-KEBANGSAAN
NAHDLATUL ULAMA**

Halaman: 1 -18

ABD. KADIR AHMAD

**AWAL KEBERADAAN NU SULSEL: TRADISI *APPALEMBA KITTAK* DAN PROFIL
PENGURUS MAJELIS KONSUL NU**

Halaman: 19 - 32

SYAMSURIJAL

**MENGINTIP NAHDLATUL ULAMA (NU) DARI TIMUR:
KHITTAH NU DALAM PANDANGAN DAN PENGALAMAN NAHDLIYIN
DI SULAWESI SELATAN**

Halaman: 33 - 53

MUHAMMAD ALWI HS

**KOMBINASI PERAN ULAMA-UMARA DALAM DAKWAH AGH. SANUSI BACO
DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BERBASIS NAHDLATUL
ULAMA DI INDONESIA TIMUR**

Halaman: 54 - 70

WENDI PURWANTO

**PENAFSIRAN KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL
ULAMA: ABDUL SOMAD, BAHAUDDIN NURSALIM DAN IDRUS RAMLI
DALAM TAFSIR VERBAL DI MEDIA SOSIAL**

Halaman: 71 - 88

SABARA

PERAN NU SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN DI PAPUA

Halaman: 89 - 106

MURSALAT

**NAHDLATUL ULAMA (NU) FEMALE FIGURES IN THE MODERN ERA:
YENNY WAHID'S GAIT AS A WOMAN WARRIOR IN HUMANITY AND PEACE**

Halaman: 107 - 121

MUHAMMAD SURYADI

**NAHDLATUL ULAMA DAN ISU LINGKUNGAN
(KOMITMEN NU MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGI DAN
SUMBER DAYA ALAM)**

Halaman: 122 - 134

MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
MENEMUKAN KEBERAGAMAN AGAMA MELALUI PENGALAMAN
BERINTERAKSI DENGAN ANAK-ANAK MUDA NAHDLIYIN
DI MAKASSAR

Halaman: 135 - 149

MUH. SUBAIR
RESISTENSI WARGA NAHDLATUL ULAMA (NU)
TERHADAP WAHABI TAKFIRI

Halaman: 150 - 167

SISWOYO ARIS MUNANDAR
PERAN DAN KONTRIBUSI K.H. YAHYA CHOLIL STAQUF DALAM
PEMBANGUNAN ISLAM MODERAT DI INDONESIA DAN DI DUNIA
INTERNASIONAL

Halaman: 168 - 185

ANI KURNIAWATI
KIAI HASYIM ASY'ARI : PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAH BELANDA

Halaman: 186 - 191

IMAM GHOZALI, IMAM HAKIM DAN NAIF ADNAN
KONSEP *SUMELEH* ABDURRAHMAN WAHID DALAM MENGEMBANGKAN
NILAI-NILAI KE-NU-AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMAJEMUKAN
MASYARAKAT

Halaman: 192 - 203

ISRAPIL DAN SYAMSURIAH
PEMETAAN MASJID DI KOTA MAKASSAR :
POTENSI DAN PELUANG LTM NU DALAM MEMAKMURKAN
MASJID DI MAKASSAR

Halaman: 204 – 213

HENRI HERMAWAN ADINUGRAHA
NAHDLATUL ULAMA UNIVERSITY IN INDONESIA: ITS ROLE AND CONCRETE
CONTRIBUTION TOWARD CURRENT EDUCATION

Halaman: 214 - 233

AWAL KEBERADAAN NU SULSEL: TRADISI *APPALEMBA KITTAK* DAN PROFIL PENGURUS MAJELIS KONSUL NU SULAWESI

Abd. Kadir Ahmad

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email Address: abdk003@brin.go.id/ahmadkadir56@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengungkap sekelumit catatan awal yang dapat membawa orang Nahdhatul Ulama (NU) mengenali dirinya dengan identitas kelahiran yang lebih jelas baik tempat maupun tahunnya. Tulisan ini diangkat dari sumber Pustaka, terutama dua sumber penting, yaitu majalah *Azzikra* (1938) dan Buku Tokoh-Tokoh Parlemen (1956). Dari kedua sumber tersebut terungkap kehadiran NU di Sulsel terjadi pada 1938 ditandai dengan kehadiran seorang Pengurus dari PBNU dan *mulaqah* ulama di Makassar pada tahun tersebut dan Riwayat hidup salah seorang ulama yang menjabat sebagai Pengurus Syuriah Makassar pada 1938. Temuan kedua adalah bahwa tradisi *bahtsul masail* yang dalam istilah lokal (Makassar) disebut *Appalemba Kittak* sudah terpola sebagai sebuah forum intelektual untuk membahas berbagai persoalan *diniyah* dan *waqiyah*. Ketiga, para pengurus Konsul dijabat oleh para ulama, pebisnis dan serta kalangan intelektual sebelum terbentuknya kepengurusan NU yang disebut Pengurus Wilayah.

Kanta Kunci: *Awal keberadaan NU Sul-Sel, appalemba kittak, konsul.*

PENDAHULUAN

Keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) di Sulsel seakan sebuah cerita yang belum pernah rampung. Minimnya sumber tertulis dan ketidakbersambungan pelaku sejarah yang masih hidup menjadi penyebab utamanya. Dalam sejarah kita tidak bisa mereka-reka begitu saja. Itulah alasannya mengapa kali ini perkara itu harus diangkat kembali. Secerach informasi dari catatan yang tidak secara langsung terkait dapat menjadi penerang dari kegelapan sejarah tersebut. Selama ini para penulis berpegang pada 1950-an awal sebagai awal masuknya Islam di Sulsel atau bahkan Indonesia Timur (Ramly, AM; Ahmad, Abd. Kadir, 2006). Beberapa cabang sudah berdiri sebelum dikenal kepengurusan di tingkat wilayah. Gowa, misalnya, mendeklarasikan pendirian NU oleh Haji Makka bersama lainnya tahun 1950 (Ahmad, 2019d). Momentum deklarasi berdirinya NU di tingkat wilayah bersamaan dengan dibukanya Kantor Kementerian Agama di Makassar yang dijabat oleh KH. Sjukri Ghazali yang juga

pendiri NU Sulawesi Selatan (Rambe, 2020). Peran K.H.Sjukri Ghazali tentu lebih tepat disebut sebagai yang memprakarsai pendirian NU dan didukung oleh ulama-ulama dan pemerintah setempat.

Dua catatan akan penulis angkat dalam tulisan ini yang sekaligus dapat menjadi petunjuk akan keberadaan NU di Sulawesi Selatan dalam era yang mendahului perkiraan yang pernah ditulis sebelumnya. Satu di antaranya catatan dari *mulaqah* ulama Syafiiyah pada 1938 dan Riwayat Hidup Ulama NU yang duduk di lembaga Konstituante dan Parlemen era orde lama. Selain memuat informasi tentang NU kedua sumber tersebut menarik dikemukakan guna memahami konteks zaman dan konteks lokal prakondisi NU berdiri di daerah ini dan sosok tokoh-tokoh NU yang duduk di Parlemen dan Konstituante hasil Pemilihan Umum Pertama, tahun 1955.

Musyawarah Ulama Syafiiyah: Bahtsul Masail *a la* Ulama Celebes

Sebuah forum ulama Syafiiyah setidaknya sudah terbentuk sebelum 1940-an di Celebes (Sulawesi Selatan sekarang). Terbentuknya Musyawarah Ulama Syafiiyah di Celebes, dimuat dalam majalah Azzikra (Daeng Paliweng, 1939). Naskah tersebut ditulis dalam Bahasa Bugis dan Makassar. Saya sadur kembali ke dalam Bahasa Indonesia dengan penambahan interpretasi, sebagai berikut:

Kesepakatan Panrita Bugis Makassar Mazhab Syafii mengenai pendirian Musyawarah Ulama Syafiiyah, di Ujung Pandang, Makassar, Celebes. Alhamdulillah patut kita bersyukur karena berkumpulnya para ulama dari Tanah Celebes untuk menghadiri pertemuan yang mulia di Ujung Pandang, kecuali satu orang yang tidak hadir, karena urusan pribadi. Adapun kegiatan pertemuan ini adalah:

Hari Selasa, 20-9-1938/25-7-'57, jam 9 pagi, dilaksanakan resepsi atau *haflah* di masjid Kampung Wajo. Ada 600 umat Islam yang hadir. Di antaranya hadir pula Tuan Kali Ujung Pandang, Tuan Kapitan Wajo, Tuan Kapitan Arab Jumpanang, Arung Lamatti Tua, Arung Kajuara Tua, Karaeng Arungkeke, juga tuan-tuan lainnya. Ada lebih dari 20 ulama yang hadir, di antaranya Puang Kali Lamatti, Puang Kali Rappang, Puang Kali Sidenreng yang lama, Wakil Kali Palopo dan lain-lain. Hadir pula Imam-imam di Ujung Pandang. Ketika resepsi dibuka berdirilah Tuan Syekh Abdul Hamid al- Misry, guru Sekolah Arab bernama al-Tahdzib al-Islamy, membaca ayat dari surah *innaa fatahna...* dan diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis oleh Anregurutta Haji Muhammad Ramli. Kemudian Nuruddin Daeng Paliweng tampil di podium berpidato dengan Bahasa Melayu. Ia menjelaskan tujuan pertemuan hari ini. Kebetulan juga

berkumpul bersama dari golongan kita **Ketua Nahdlatul Ulama** dari Jawa. Setelah itu para pembicara memberi nasihat secara bergantian hingga masuk waktu zuhur dan salat zuhur berjamaah kemudian hadirin dijamu makan siang, kemudian bubar.

Pada malam Rabu berkumpul lagi sekitar 1000 orang lebih di Masjid Kampung Wajo. Kira-kira 200-an perempuan dengan menggunakan tabir (*pallawa*) dari tempat laki-laki di bagian Selatan masjid. Yang memimpin acara adalah Tuan Nuruddin Daeng Paliweng. Setelah berterima kasih kepada semua hadirin seperti biasa, juga berterima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan petugas dari polisi untuk menjaga keamanan dalam masjid dan di luar masjid, dan terima kasih kepada toko... yang meminjamkan lampu untuk digunakan di dalam masjid. Setelah itu, tampil Haji Muhammad Yusuf Lamuru (Bone) membaca ayat dari Surah *al-Isra*. Kemudian Anregurutta Haji Muhammad Said yang membuka pengajian di Bone, tampil menjelaskan tafsir dari ayat yang dibacakan dengan Bahasa Bugis. Hadirin sangat antusias mendengarkan uraian tersebut. Setelah itu, para *anregurutta* kemudian silih berganti membaca per pasal per orang bahasa Arab-nya Mi'raj (dan) al-Barzanjiy, hingga tamat. Karena *anregurutta* Haji Muhammad As'ad yang sedianya akan menguraikan hikmah Isra Mikraj tidak hadir, maka digantikan oleh Anregurutta Haji Muhammad Ramli dalam Bahasa Bugis. Ada dua jam ia membawakan ceramah dan dipuji oleh hadirin mengenai kisah perjalanan Nabi ke Baitul Maqdis hingga dinaikkan ke langit. Pada jam 12 acara ditutup dengan aman

dan damai.

Pada hari Rabu, 21-9-1938/26 Rajab 1357, sejak jam 9 pagi, berkumpul lagi para *anreguntu topanritae* di gedung Sekokah al-Tahtdzib al-Islamy. Mereka yang hadir juga yang memiliki pandangan di kalangan warga negeri **mendirikan suatu majelis ulama yang disebut Musyawarah Ulama Syafiiyah**. Adapun tujuannya adalah untuk kebaikan agama Islam dan keluarga Muslim. Semua utusan yang hadir pada musyawarah itu memutuskan untuk mereka berkumpul sekurang-kurangnya sekali setahun di Ujung Pandang untuk saling memberi pandangan tentang masalah keagamaan Islam. Begitu juga berusaha mengeluarkan kitab-kitab yang berguna untuk dibaca sesama keluarga Muslim. Nanti di pertemuan itu disepakati peraturan atau undang-undang (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) Musyawarah.

Meskipun sebagai semacam forum sebagaimana dikenal sekarang musyawarah ulama tersebut juga dilengkapi dengan kepengurusan lengkap terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, yang menggunakan istilah bahasa Arab. Pada jajaran pengurus harian, tertulis ketuanya adalah Haji Ahmad Bone, dibantu seorang wakil ketua atas nama Tuan Muhammad Nuruddin Daeng Paliweng, sementara sekretaris atau *katib* dipercayakan kepada Haji Muhammad Ramli. Adapun bendaharanya tercatat Tuan Haji Abdullah. Kepengurusan ini juga dilengkapi dengan sejumlah nama yang disebut *muawin* atau pembantu. Jabatan ini lebih banyak diduduki oleh tokoh agama dari kalangan para imam, seperti Imam Ujung Tanah, Haji Abdul Karim, dan Haji Abdul Rasyid. Mereka disyaratkan tinggal di Ujungpandang. Perangkat kepengurusan lainnya adalah jajaran komisi yang disebut *mufattisy*. Hanya satu orang dari kalangan

ulama yang masuk posisi ini yaitu Kali Lamatti. Anggota komisi tidak harus menetap di Ujungpandang.

Pada malam Kamis, 22-9-1938/27 Rajab 1357, jam 9, diadakan tabligh umum di Masjid Kampung Wajo. Lebih banyak lagi orang yang hadir dibanding hari Rabu. Yang menjadi pemegang peran pada tablig itu adalah Anregurutta Haji Muhammad Ramli. Sementara pembicara pertama adalah Tuan Muhammad Ali, Bone, mengutip ayat dan menafsirkannya dalam bahasa Bugis. Kemudian tampil Tuan Abu Thahir Balannipa memberi nasihat. Kemudian Syekh Ali Mathar guru Sekolah Arab Rappang tampil memberi nasihat yang cukup panjang. Kemudian tampil Tuan Haji Busthami Kajuara juga tampil memberi nasihat di sekitar masalah jual beli menurut *syara'*. Kemudian tampil Tuan Haji Abdullah Lamuru menjelaskan mengenai tauhid kepada Allah. Ia berbicara 1 jam lebih. Jam 12 malam tablig ditutup dengan aman. Polisi yang berjaga pada malam itu layak disyukuri berkat keamanan tablig.

Hari Kamis, 22-9-1938/27 Rajab 1357, sejak jam 9 pagi, duduk lagi *anregurutta topanritae* di gedung Sekokah al-Tahtdzib al-Islamy untuk membicarakan masalah-masalah musyawarah. Masalah yang dibahas adalah (i) zakat uang kertas, setelah dibahas panjang lebar, diputuskan wajib dizakati; (ii) permulaan bulan Ramadan untuk berpuasa. Mengenai masalah ini mulai tahun ini dibahas awal puasa. Diharapkan juga dikomunikasikan dengan semua Kadi di Celebes. Mengenai hal ini akan dibahas dalam musyawarah berikutnya; (iii) masalah bid'ah, bid'ah *lugawi* terbagi dua, yaitu bidah *hasanah* dan bid'ah *gairu hasanah*, akan dibicarakan nanti secara lengkap; (iv) masalah terjemah khotbah Jumat. Masalah ini sesungguhnya di kalangan ulama Anregurutta yang hadir semua sepakat mengenai kebolehan diterjemahkan selain rukunnya, sesuai dengan pandangan ulama *muktabarah*. Namun demikian, karena Anregurutta Haji Muhammad Said Bone, karena sakit, begitu

juga Anregurutta Haji Muhammad Asad karena ada urusan penting, maka masalah ini akan diputuskan pada musyawarah kedua; (v) masalah jual beli *salam*. Masalah ini muncul karena dipermasalahkan oleh Anregurutta Haji Muhammad Asad dan Haji Muhammad Ramli. Jadi tidak adil diputuskan kalau tidak ada Anregurutta Haji Muhammad Asad. Sehingga keputusannya ditunda sampai musyawarah kedua. Pertemuan berlangsung hingga pukul 12 siang.

Pada malam Jumat berkumpul lagi *Anregurutta* yang masih ada di Ujung Pandang (belum pulang setelah sidang kelima) di rumah tuan Haji Ahmad Bone. Kita hanya bersenang-senang karena sudah mau berpisah. Ada juga hadir Tuan Kapitan Wajo dan pada malam itu pulalah disepakati mengangkat Tuan Baso Daeng Malewa, Kapitan Wajo, menjadi *Beschermheer* (pelindung) Musyawarah. Inilah satu tanda bahwa sesungguhnya Musyawarah Ulama Syafiiyah *aqamahallahu waadamaha* tetap abadi tidak ada pemisahan *adat* dan *sarak* (*maknennungenngi temassarang adee nannia sarae*) di Ujung Pandang khususnya di Celebes umumnya. *Verslaggever* Muhammad Nuruddin Daeng Paliweng di Makassar (Daeng Paliweng, 1939: 287).

Pertemuan (*mulaqah*) kedua Musyawarah Ulama Syafiiyah. Peristiwa tersebut berlangsung hari Ahad, 23-25 Rabiul Akhir 1358H/11-13 Juni 1939M di Ujung Pandang (Makassar) Celebes Selatan. Musyawarah tersebut disebutkan sebagai musyawarah atau pertemuan kedua (*mulaqah tsaniyah*). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi majelis (*empowang*) fatwa. Sebagai forum yang menghimpun para ulama kalangan penganut Mazhab Syafi'i dari kawasan Sulawesi yang disebut Celebes, kewenangan utamanya adalah dibidang hanya fatwa. Fatwa, bagi mereka secara hukum *syarak* dikategorikan sebagai *parallu kipayah* atau *fardu kifayah*.

Menarik untuk disebutkan bahwa para ulama waktu itu membagi fatwa ke dalam dua kategori. Salah satunya adalah

apa yang mereka sebut fatwa sebagai kegiatan melakukan upaya mengeluarkan hukum dari *nash-nash* dalam format *istinbath* hukum agama atau *bicara syarak* dari sumber utamanya yaitu Al-Qur'an atau Hadis. Mekanisme ini masuk dalam kategori *ijtihad*. Jenis fatwa lainnya mereka sebut *appalemba kittak* atau *fatwa naqli*. Kegiatannya adalah tidak lebih dari *appalemba* atau manyalin pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab yang *mu'tamad* atau masyhur di kalangan *Syafiiyah* atau mengambil pandangan dari para *mufti ahli*.

Para ulama yang mengikuti paham mazhab disebutnya sebagai *panrita muqallid* atau ulama pengikut mazhab. Kalangan *panrita muqallid* tersebut memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensinya sebagai pelaku fatwa jenis kedua, yaitu *appalemba kittak*. Adapun *pammentenganna tupanrita mujtahidka* atau posisi ulama yang memiliki kompetensi sebagai *ulama mujtahid* memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa kategori pertama, yaitu fatwa sebagai produk *ijtihad*.

Ada beberapa masalah yang masuk dalam agenda pembahasan seperti yang dimuat dalam majallah Azzikra. Tercatat di antaranya masalah tentang kedudukan khutbah yang dibawakan tidak dalam bahasa Arab, kedudukan jual beli dalam bentuk *salam*, kedudukan hukum agama tentang cuka atau *ballok alling* dan perihal keharaman dalam perkara sembelihan. Termasuk dalam agenda pembahasan mereka adalah soal apa yang dikategorikan sebagai bid'ah menurut agama dan kedudukan menutup aurat untuk perempuan dewasa.

Sebanyak 17 ulama yang merupakan *ledenna musywarayya* atau delegasi dalam musyawarah, akan tetapi hanya 10 ulama yang sempat hadir secara langsung, sedangkan tujuh ulama lainnya memberikan pandangannya lewat surat. Masalah krusial pertama yang dibahas dalam musyawarah tersebut karena dianggap aktual adalah soal khutbah yang

dibawakan selain dalam bahasa Arab. Soalnya tradisi membaca khutbah saat itu bahwa khutbah harus dalam bahasa Arab. Tradisi ini berasal dari Timur Tengah, khususnya Makkah dan Madinah sebagai rujukan. Salah seorang ulama keluaran pendidikan di Makkah, Anregurutta Muhammad As'ad (1908-1952) mempertahankan tradisi tersebut, sementara ulama lain cenderung mulai menerima perubahan. Berdasarkan rujukan dalil-dalil yang sah musyawarah memutuskan bahwa hukum khutbah di luar bahasa Arab hukumnya *mubah* atau *harus*. Kebolehan itu terbatas pada uraian khutbah di luar rukun khutbah yang dikenal dalam teks-teks *fiqh*.

Pembahasan kedudukan cuka atau *ballok alling* (dalam Bahasa Makassar) yang merupakan kebutuhan sehari-hari, juga mengambil porsi tersendiri. Majelis mengeluarkan imbauan kepada produsen cuka agar memperhatikan kebersihan dari segi Kesehatan dan kebersihan dari segi agama atau syarak. Agenda pembahasan jual beli *salam*, karena dianggap membutuhkan pembahasan lebih mendalam, ditunda untuk *mulaqah* berikutnya. Status hukum *ballo alling* berhasil disepakati kebolehannya, hanya saja diimbau kepada masyarakat terutama para produsen untuk memperhatikan kebersihan dari aspek Kesehatan, selain kebersihan dari aspek *syarak*. Hal itu didadarkan pada temuan di lapangan bahwa produsen cuka tidak kurang yang melalaikan aspek kebersihan dan sterilitas dari aspek syarak.

Keputusan musyawarah yang mengambil porsi lebih panjang adalah pembahasan tentang bid'ah. Majelis membagi bid'ah ke dalam dua jenis yaitu bid'ah *lugawiyah* dan bid'ah *syar'iyah*, meski sumbernya hanya satu yaitu bid'ah *lugawiyah*. Menarik bahasan tentang bid'ah ketika majelis mengaikan status hukum syar'inya dengan hukum-hukum taklif, dalam kategori haram, makruh, sunah, wajib, dan *mubah*. Hukum taklif ini merupakan standar untuk menilai status

hukum tentang bid'ah. Jika ditemukan sesuatu perkara yang jelas statusnya haram berdasarkan dalil yang syar'i, maka perkara itu juga dinilai haram. Begitu pula juga ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu makruh, maka statusnya juga makruh. Demikian seterusnya, sesuatu itu wajib jika ada dalil yang mendukung status wajibnya. Sepanjang tidak ada dalil yang menjadi rujukan akan keempat status hukum tersebut, maka apa yang disebut sebagai bid'ah dikategorikan sebagai *mubah* atau *harus*. Tetapi kalau tidak ada dalil mengenai keempat hukum tersebut, maka bid'ah itu termasuk *harus* atau *mubah*. Menurut para ulama ini, apa yang disebut bid'ah menurut syarak adalah apa yang masuk dalam kategori *haram* atau *makruh*. Inilah yang dimaksud salah satu hadis Nabi Saw *wakullu bid'atin dalalah*, bahwa setiap bid'ah dikategorikan sesat, berdasarkan pandangan Ibnu Hajar.

Majalah Az-Zikra juga menurunkan reportase perjalanan Ali Mathar (dari *Madrasatu Rappang al-Arabiyyah*) yang diutus ke Pulau Jawa oleh Forum guna melakukan studi banding soal praktik khutbah hari Jumat tersebut. Hal itu dilakukan berdasarkan informasi awal bahwa di Tanah Jawa praktik khutbah sudah mengalami perubahan. Tujuan studi banding tersebut untuk memperkuat keputusan forum ulama mengenai status bolehnya khutbah dibacakan dalam bahasa selain bahasa Arab. Disebutkan bahwa Ali Mathar pertama mulai dari Surabaya hingga ke Solo Jawa Tengah. Tentu ini merupakan sebuah perjalanan yang serius dan tidak ringan pada saat itu. Ia menyebutkan, setelah bermalam semalam di Surabaya ia melanjutkan perjalan ke Solo keesokan harinya. Ia harus menunggu tiga malam sebelum hari Jumat tiba, dan melaksanakan salat Jumat di Masjid Kesunanan Solo, masjid di mana raja biasa melakukan salat Jumat dan tempat banyak didapati ulama Syafiiyah, khususnya ulama dalam bidang fikih. Saat mengikuti prosesi rangkaian salat Jumat ia mengamati dan mengikuti dengan cermat pelaksanaan khutbah

termasuk bahasa yang digunakan, sebagai tujuan utama yang ingin dilihatnya. Ternyata, ia menyaksikan khatib bukannya menggunakan bahasa Arab melainkan bahasa daerah (Jawa). Tentu saja dengan catatan, rukun khutbah tetap dalam bahasa Arab.

Setelah melakukan observasi di Solo, ia kemudian kembali ke Surabaya guna mengamati hal yang sama, kali ini di masjid Ampel. Fokus pada pelaksanaan khutbah Jumat ia menemukan hal yang sama dengan praktik khutbah di Solo. Khatib di masjid Ampel, menyampaikan uraian khutbah dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Kedua testimoni itu sudah cukup bagi (Syekh) Ali Mathar dari sekolah Arab Rappang tersebut untuk mengambil kesimpulan tentang status kebolehan menyampaikan khutbah dalam bahasa selain bahasa Arab sebagaimana diputuskan Musyarawah Ulama Syafiiyah Celebes. Awalnya ia mengagendakan untuk melakukan observasi tema yang sama di Semarang dan Malang, akan tetapi urung dilanjutkan karena pertimbangan keterbatasan waktu. Namun demikian, ia mengaku sudah mengonfirmasi ke beberapa orang jamaah masjid di Solo dan Surabaya mengenai pelaksanaan khutbah di Semarang dan Malang, dan ternyata jawabannya pelaksanaan khutbah di dua daerah disebutkan terakhir sama saja dengan yang lainnya. Ali Mathar juga menyebutkan, bahwa hanya masjid-masjid besar di Solo dan Surabaya yang menjadi lokus studi banding, karena dipandang sudah mewakili masjid-masjid lain dai daerah itu. Reportase itu ditulis pada 19 Jumadil Akhir 1358/ 29 Juni 1939 (Ahmad, 2019a).

Wacana tentang khotbah tersebut, setidaknya bersumber dari sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seorang pelanggan majalah dari Sidenreng. Pertanyaan adalah, bagaimanakah hukumnya khutbah yang dibawakan dengan menggunakan bahasa *ajam* (bukan bahasa Arab). Apakah sah atau tidak. Ada tiga ulama yang dihormati dengan sebutan

al-aizzatul muhtaramin Haji Muhammad Thahir *qadli* Balannipa, Haji Abdul Gani al-Pathiriy (Pasisir?) dan Haji Zainuddin al-Marusiyy diberikan tugas menjawab pertanyaan tersebut. Karena dianggap sangat penting dan pengaruhnya sangat berdampak luas di masyarakat, maka wacana tersebut dimasukkan dalam agenda sidang majelis fatwa ulama Syafiiyah.

Poin penting dalam sejarah terbentuknya Musyawarah Ulama Syafiiyah sebagai forum diskusi keagamaan mengingatkan kita dengan tradisi bahtsul masail NU sekarang ini sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan berbagai masalah agama dan keumatan. Kebiasaan diskusi antara sesama ulama pemegang otoritas keilmuan dan jabatan keagamaan, seperti para *qadhi* dan imam (pejabat syarak) dan pemangku adat yang diwakili oleh jabatan kepala suku yang disebut kapitan kala itu menunjukkan wawasan kebangsaan di mana adat dan syarak tidak dapat dipisahkan.

Forum itu juga dapat menjadi petunjuk bahwa NU sebenarnya pada waktu itu sudah ada di Makassar, ditandai dengan kehadiran Ketua NU dari Jawa dalam forum tersebut pada Hari Selasa, 20-9-1938. Satu-satunya organisasi yang disebutkan kehadirannya dalam *haflah* tersebut adalah NU, selain jabatan syarak seperti Qadhi dan jajaran para Imam. Inilah petunjuk awal mengenai kehadiran NU di Makassar pertama kalinya sebagai organisasi di Celebes.

Konsulat NU

Terkait informasi kehadiran pengurus NU dari Jawa pada forum Ulama Syafiiyah di Ujungpandang pada tahun 1938 dapat dikaitkan dengan adanya institusi NU di daerah-daerah di luar Jawa yang bernama Konsulat. Ternyata, kepengurusan awal NU di daerah-daerah belum dikenal adanya Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) melainkan dalam bentuk Konsul atau Majelis Konsol. Majelis ini hanya ada pada wilayah tertentu yang dipandang perlu oleh PBNU.

Fungsinya menjadi kordinator Pengurus Cabang NU yang terlebih dahulu terbentuk dan mempermudah hubungan PBNU dengan cabang-cabang. Struktur kepengurusan konsul masih sederhana, terdiri dari seorang pimpinan yang disebut konsul, sekretaris, dan bendahara. Di bawahnya terdapat semacam komisaris daerah. Namun demikian, struktur kepengurusan konsul bersifat dinamis dan fleksibel. Pada zaman Jepang misalnya, formatnya mengalami perubahan dari format zaman Pemerintah Hindia Belanda (<http://www.nu.or.id/post/read/62449/>).

Pembentukan Majelis Konsul ditetapkan pada tahun 1937 dalam forum Mukhtar NU ke-12 yang berlangsung di Malang, Jawa Timur. Ada Sembilan Konsul yang dibentuk pada saat itu, semuanya masih terbatas di wilayah Jawa dan Madura. Dua tahun kemudian, yaitu

menjelang Mukhtar NU ke-14 yang berlangsung di Magelang pada tahun 1939 beberapa konsul di kawasan Jawa Tengah dibentuk untuk mengordinasikan cabang-cabang NU yang ada di daerah-daerah itu. Situasi politik dan keamanan membuat pembentukan konsul di luar Jawa dan Madura mengalami kendala. Daerah-daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil dikuasai Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang (Farid, 2016).

Bahkan, seperti akan dilihat kemudian para konsul yang membawahi Sulawesi baru dikenal pada awal hingga pertengahan tahun 1950-an. Pada saat itu beberapa cabang memang sudah terbentuk, seperti pada tabel di bawah ini (Ramly, AM; Ahmad, Abd. Kadir, 2006).

Tabel 1: Pengurus Cabang NU di Sulawesi Tahun 1951-1966

NO	NAMA CABANG	TAHUN	NAMA PENGURUS
01	Labbakkang (Pangkep) (anggota 350 orang)	23 Januari 1951	H. Bakri (Ketua), Syamsuddin (panitera), S.Dg Ngitung (bendahara)
02	Gorontalo (anggota 7.500 orang)	21 April 1951	M. Mile (ketua), H.K.Kasiru (wakil) H. Naoma (panitera), dan I.Hippy (bendahara).
03	Bulukumba	5 Februari 1952	Abdul Kahar Dg Maccora (ketua), Muh. Siri Dg Masikki (wakil), Padalangi (panitera), H. Abdullah (bendahara). K.H.Zainuddin Dg Mangati (Rais Syuriah), K.H.Abd. Jabbar dan K.H.Abd. Karim (wakil), K.H.M.Saleh Dg Silele dan K.H.Abd. Kadir Pulu (katib I dan katib II).
04	Tomohon (anggota 500 orang).	15 Januari 1953	K. Salumpu (ketua), A. Laguna (wakil), K.A.Tomungku (panitera).
05	Makassar	21 Februari 1953	H.M.Saifuddin (ketua), H.M.Amin Nashir (wakil), H.M.Danial (panitera), H.Abdullah Yusuf (bendahara)
06	Maros		Supu Dg Sau (ketua), Patawari Dg Rupa (wakil), Abdul Muttalib (panitera) dibantu oleh Nangko dan Saguni, Lanto (penasihat), Abd. Rivai Dg Narala (pelindung).
07	Parepare	November 1955	K.H.Harun Rasyid (ketua), Abd. Karim Waqqas (wakil), Muhibuddin (panitera), H. Radhi (bendahara).
08	Bone		K.H.Abd. Aziz Palaguna (ketua), H. Nihaya (wakil), Abd. Ganie (panitera), dan Andi Pabbenteng (bendahara).

09	Polewali Mamasa		H. Muhsen Thahir (ketua), La Tinulun (wakil), Abdul Jalil S (panitera), A. Salam (bendahara).
10	Bontain		H. Minhaj (ketua) H.Maddaremeng (panitera), Junaid (bendahara).
11	Palu (anggota 1000 orang)	5 Juli 1955	Dg Maria Jayalangkara (ketua) Abu Bakar Al-Jufri (panitera), Abdullah aL-Jufri (panitera), Husen Mahdan (bendahara)
12	Poso		A. Latonji (ketua), La Badu (wakil), Andi Nuari (bendahara)
13	Luwuk		Dg Yasin (ketua), A.K.Al-Husain (wakil), M.Erot (panitera), A.Balhar (bendahara).
14	Kotamubagu	4 Juli 1966	M.E. Monangki (ketua), J.A.Mokodongan (wakil).

Rentang waktu pembentukan NU Cabang di Sulawesi hanya berlangsung dalam lima tahun (1951-1955), kecuali Kotamubagu tahun 1966. Hal itu menunjukkan pergerakan NU yang begitu masif bukan hanya di daerah-daerah mayoritas penduduk Muslim tetapi juga di daerah basis Kristen.

Pengurus Wilayah untuk Sulsel sendiri baru terbentuk pada tahun 1953 diprakarsai oleh K.H. Ghozali, yang bertugas di daerah ini sebagai kepala yang kemudian dikenal sebagai Kantor Wilayah Departemen Agama. Sejumlah nama yang termasuk sebagai pendiri NU di daerah ini adalah:

Tabel 2: Daftar Pendiri NU Sulsel

NO	NAMA
01	K.H.Ahmad Bone
02	K.H.Muhammad Ramli
03	K.H.Sayyid Jamaluddin Puang Ramma
04	K.H.Saifuddin
05	H.Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim (raja Bone)
06	Andi Djemma (Datu Luwu)
07	K.H.Hasan M
08	S. A. Al-Habsyi
09	K.H.Abd.Rahman
10	Husein Saleh Assagaf
11	K.H.Abd. Rasyid
12	Abdullah Yusuf
13	H Gulam Gaus
14	A. Rahim Rangka

Pendiri NU tersebut merupakan komposisi dari berbagai latar belakang baik ulama, politisi, dan saudagar, dan tokoh adat, dalam hal ini para raja. Hal ini membuat NU dapat tumbuh dan berkembang bak cendawan di musim hujan.

Masih banyak ulama NU yang sudah *eksis* pada saat itu, bahkan sejak tahun 1930-an, seperti Abdul Hamid Daeng Maggassing, H. Abdul Rasyid Daeng Lompo, Ahmad al-Banjar, dan Abdurrahman Daeng Situju.(Ramly, AM; Ahmad, Abd. Kadir, 2006). Mereka ini tidak tercatat sebagai pendiri NU tetapi ikut mendorong kehadiran NU di tengah masyarakat. Pada saat yang sama beberapa tokoh NU juga tercatat sebagai pengurus Konsul NU. Pada tahun 1950-an tersebut baik PWNU Sulsel maupun Konsul NU keduanya hadir bersamaan. Tidak jelas mengapa keberadaan Pengurus Wilayah NU di Sulsel tidak serta merta menggantikan peran Konsul di daerah ini. Kenyataannya hingga Pemilu tahun 1955 para ulama yang mengikuti pesta demokrasi pertama tersebut dan kemudian duduk di Parlemen dan Konstituante masih tercatat sebagai pengurus Konsul. Diduga hal itu terjadi karena wilayah kerja konsul mencakup wilayah Sulawesi, sementara pengurus wilayah NU yang baru terbentuk hanya terbatas untuk wilayah Sulsel.

Para Konsul, Anggota Parlemen, dan Konstituante

Pemilu 1955 bukan hanya memilih Anggota Konstituante tetapi juga memilih anggota Parlemen atau DPR. Khusus Konstituante bertugas untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pengganti Undang-Undang Dasar Sementara. Hal itu tercantum pada Pasal 134 UUDS 1950. Saat itu, partai-partai peserta pemilu terpolarisasi ke dalam tiga blok, yaitu blok Pancasila, blok Islam, dan blok Sosio-Ekonomi. Blok Islam terdiri dari NU, Masyumi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Blok Pancasila terdiri dari PNI dan PKI. Blok Sosio-Ekonomi diwakili oleh Partai Buruh dan Partai Murba. Pemilu pertama di Indonesia itu menghasilkan 550 kursi di Konstituante, masing-masing 274 kursi (53%), dari blok Pancasila, 230 kursi (44,8) untuk blok Islam, dan sisanya 10 kursi (2 %) untuk blok Sosio-Ekonomi. Peraih kursi terbesar berdasarkan partai berturut-turut PNI (119 kursi), disusul Masyumi (112 kursi), dan NU meraih 91 kursi (Parlaungan, 1956). Khusus dari Sulawesi Selatan dan Tenggara, anggota NU Konstituante dari NU adalah Gulam, H.S. Djamaluddin Daeng Paremma, Abdul Muin Daeng Myala, K.H.Muhammad Ramli, dan Ny. Siti Djamrud Daeng Tjaja.

Sayangnya, hingga akhir masa periode, tahun 1959, Konstituante masih mengalami *deadlock* dalam membentuk UUD sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Beberapa kali voting dilakukan tetapi selalu mengalami jalan buntu. Meskipun mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, jumlahnya tidak pernah mencapai *quorum* yaitu 2/3 dari jumlah keseluruhan anggota. Kegagalan membentuk UUD sebagai pengganti UUDS tersebut membuat Presiden Soekarno mengambil inisiatif mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Masa bakti Konstituante dari 9 November

1956 sampai 5 Juli 1959 praktis sudah selesai (Ahmad, 2019c).

Selain Konstituante, Pemilu Tahun 1955 juga dimaksudkan untuk memilih anggota Parlemen atau DPR. Sejumlah 257 orang anggota parlemen yang terpilih saat itu, termasuk 45 kursi perolehan NU. Dua orang di antaranya dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan dan Tenggara yaitu Husein Saleh Assegaf dan Hadji Muhammad Saifuddin bin H.M.Nur. berbeda dengan Konstituante yang harus berakhir tahun 1959, anggota Parlemen masih berlanjut hingga runtuhnya Orde Lama. Profil kedua tokoh NU anggota Parlemen tersebut dapat diringkas sebagai berikut ini. Profil tokoh diambil dari buku Tokoh-Tokoh Parlemen (Parlaungan, 1956). Tentu ini tidak termasuk profil mereka setelah era Parlemen.

H. M. Saifuddin

H.M.Saifuddin bukan hanya dikenal sebagai anggota parlemen mewakili Partai NU dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan dan Tenggara tetapi juga salah seorang pendiri NU Sulsel. Pria kelahiran Pambusuang (Mandar) pada 14 September 1909 ini memiliki pengalaman organisasi dan pekerjaan yang beragam mulai dari guru hingga Qadi. Tahun 1926-1930 misalnya ia menjadi guru salah satu pesantren di Pambusuang, guru dan Direktur Madrasah Nurul Islam di Polewali (1931-1936). Bukan hanya di Mandar profesi sebagai guru masih berlanjut ketika ia harus pindah ke Makassar. Tempat pengabdianya berlabuh di SMI Datu Museng di Makassar (tahun 1949-1952). Ketika masih di Mandar ia juga menjabat Imam Syarak Kota Polewali (1932-1937) dan Qadi (Penghulu Syarak) Polewali di Mamasa (1937-1947).

Pindah ke Makassar selain mengajar juga tetap menjalani posisi lainnya seperti anggota penasihat Mahkamah Syar'iyah Makassar (tahun 1950-1955) dan Kepala Bagian D di KUA Provinsi Sulawesi (1953-1955). Sebelumnya (1952-1953), sempat bekerja

sebagai propagandis atau bagian penerangan di Kantor Penerangan Agama Provinsi Sulawesi berkedudukan di Makassar. Ia juga pernah diserahi tugas selaku Imam Masjid Raya Makassar (tahun 1951-1955). Tidak hanya itu, H.Saifuddin yang kemudian bergelar kiai itu juga merupakan pemimpin Gerakan Revolusi di daerah Mandar menyebabkan ia ditawan di Polewali dan Majene. Belanda kemudian melepaskannya setelah Persetujuan Renville.

Meski ia dikenal sebagai salah seorang pendiri NU dan anggota parlemen dari NU, ia memiliki Riwayat terdaftar sebagai orang penting Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Jabatannya Bestuur PSII Cabang Polewali (1948 – 1949). Riwayat hidup sebagai anggota parlemen mencatatkan dirinya sebagai anggota parlemen No.140, beralamat di Makassar, Jalan Monginsidi No. 105, dan di Jakarta beralamatkan Jalan Sawahlunto, No. 14.

Ketika belajar di Pesantren di Polewali dan Pambusuang (1917-1921) ini juga belajar di Sekolah Rakyat (*Gouvernement*) (1916-1921) di kampungnya. Sambil menunaikan ibadah haji ia menyempatkan belajar di Mekah hingga tamat di Madrasah Al-Falah (1921-1925) sambil mengikuti pengajian *takhassus* di Masjidil Haram. Saifuddin juga tidak ketinggalan mengikuti perkembangan dengan mengikuti kursus bahasa Inggris hingga tingkat *advance* (tahun 1938).

Husein Saleh Assegaf

Ulama NU lainnya yang duduk di Parlemen masa Orde Lama adalah Husein Saleh Assegaf. Ia juga termasuk salah seorang pendiri NU Sulsel. Anak Tuan Saleh (Saleh Assegaf), pelopor toko buku agama di Makassar ini, terbilang aktif di NU ketika masih belia. Tahun 1938 ia sudah terlibat dalam kepengurusan NU Cabang Makassar, posisinya selaku sekretaris (*katib*) Syuriah, dan aktif sebagai Komisariss Umum Kepanduan Ansor Sulawesi. Posisi itu membuat ia

dipercaya sebagai Konsul NU wilayah Sulawesi pada tahun 1953.

Pria kelahiran Makassar pada 27 Desember 1922 dan meninggal tahun 1992 itu lebih dikenal sebagai seorang pendidik dan da'i, tentunya. Sejak usia 17 tahun ia sudah mengajar di SMP dan Sekolah Guru Bawah (Bagian Islam) (1939 - perang dunia II pecah). Ia kembali melakoni aktivitas mengajar – kali ini di SGA dan SMA Islam- selepas perang hingga tahun 1955, ketika ia harus masuk ke kancah politik praktis. Setelah menjalani karir sebagai anggota parlemen (1955-1965) ia kembali mengisi hari-harinya dengan mengajar di Sekolah Persiapan IAIN (SPIAIN) Alauddin Makassar - tahun 1972/1973, penulis sempat diajar di sekolah binaan IAIN tersebut- dan aktif sebagai da'i.

Berlatarbelakang pendidikan guru agama (Sekolah Guru Agama Muallimin 'Ulja) dan kemudian belajar di Mekah sambil menunaikan ibadah haji membuat murid dari K.H.Ahmad Bone ini, memiliki modal pendidikan dan perbendaharaan agama yang cukup mumpuni. Terlebih lagi kesetiannya mengikuti dan belajar ke K.H. Ahmad Bone hingga ulama besar, salah seorang pendiri NU Sulsel ini, meninggal pada tahun 1972.

Berbeda dengan Konstituante yang harus bubar tahun 1959, anggota Parlemen masih berlanjut setelah itu dan berubah menjadi DPRGR bentukan Soekarno. Husein Saleh termasuk yang masih berlanjut hingga tahun 1965 ketika Soekarno jatuh. Munir Husein, putra tertuanya, menyebutkan, ayahnya itu menjadi seorang “Soekarno” begitu lamanya bersama dengan rezim Soekarno. Simbol Kepala Banteng sebagai lambang perjuangan Soekarno tetap dirawat dan disimpan di rumahnya sebagai memori (Ahmad, 2019b). Perjalanan kariir dan aktivitasnya di NU berakhir setelah tugasnya di Parlemen selesai. Ia kembali aktif di masyarakat, terlibat di Jiwa (*Jamiatul Ittihad wal Muawanah*), suatu organisasi orang Arab di Makassar. Tercatat ia tinggal di Jalan Nusantara 273

Makassar, alamat yang terdaftar di administrasi Anggota Parlemen.

Anggota Konstituante dari kalangan NU Sulawesi lebih banyak lagi, yaitu empat orang. Mereka adalah K.H.Muhammad Ramli, Abdul Muin Daeng Myala, H.S. Djamaluddin Daeng Paremma, Gulam, dan Ny. Siti Djamrud Daeng Tjaja. Profil mereka disadur dari dokumen anggota Konstituante dan mencakup Riwayat hidup sebelum mereka duduk di lembaga semacam MPR tersebut.

K.H.Muhammad Ramli

Berbeda dengan tokoh-tokoh NU dari Sulawesi lainnya, yang menduduki jabatan sebagai Konsul NU, K.H.M.Ramli, pada 31 Januari 1954, tercatat sebagai Anggota Pengurus Besar (PB) Bagian Syariah, Partai NU. Lahir 17 Agustus 1902, di Bone, ia merupakan anggota Konstituante dan Parlemen tertua dari NU Sulawesi dengan nomor keanggotaan 37. Dilantik pada 9 November 1956 K.H.M. Ramli tidak sempat menjalani tugasnya hingga akhir. Ia wafat 4 Februari 1958 di Bandung dan digantikan oleh Ny. Siti Djamrud Daeng Tjaja hingga akhir masa jabatan.

Ia memiliki latar belakang pekerjaan beragam. Pada tahun 1 Maret 1922, Ramli muda sudah dipercaya sebagai Imam di Kajua, tempat kelahirannya. Pengabdianya lebih lama dijalani sebagai Kadi di bekas pusat kerajaan Luwu di Palopo mulai 1 Juli 1930 hingga 1 September 1937. Jabatan yang sama dilakoni kembali untuk kedua kalinya mulai 1 Oktober 1942 hingga 31 Desember 1947. Masa setelah di antara dua periode jabatan Kadi tersebut, yaitu 1 September 1937 hingga 1 Oktober 1942 dijalani sebagai guru sekaligus kepala Sekolah Islam di Makassar.

Setelah mengabdikan pada jabatan keqadlian di Luwu, ia lebih banyak menetap dan bekerja di Makassar. Pada 1 Februari 1948 hingga 1 Desember 1949, ia mendapat amanah sebagai Ketua Majelis Islam. Tidak ada informasi memadai mengenai tugas dan

fungsi lembaga keislaman tersebut. Setelah itu, ia kembali dipercaya sebagai guru merangkap kepala sekolah Islam di Makassar sejak 1 Februari 1950 hingga 1 Desember 1954. Jabatan sebagai Kepala Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Provinsi Sulawesi dijalani pada 1955. Ia juga pernah memimpin sebagai Ketua Umum mesjid Raya Makassar sejak 1 April 1956.

Di antara semua jabatan itu, yang monumental dan menjadi *memory collective* masyarakat Sulsel adalah jasanya sebagai salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia pada 1954. Bukan hanya sebagai pendiri lembaga pendidikan Islam swasta terkemuka di Indonesia Timur tersebut tetapi juga menjadi mahaguru dalam bidang studi Hukum Fiqih. Ia juga diberi amanah sebagai Ketua Umum (Rektor) perguruan tinggi yang baru dibangun tersebut sejak 1 Maret hingga wafat pada 1958.

Bertempat tinggal di Jalan Monginsidi L 20/19, Makassar, pendidikannya berawal pada Sekolah Islam (setingkat SR) dan kemudian Sekolah Guru di Bone. Kelihatannya, modal pendidikan yang menjadi modal kuat bagi kariernya sebagai ulama adalah bahwa ia pernah belajar di Mekah pada Sekolah Agama Tingkat Menengah empat tahun lamanya.

Abdul Muin Daeng Myala

Abdul Muin adalah anggota Majelis Konsul NU untuk wilayah Sulawesi. Sebelum menjadi konsul NU ia memiliki beragam pekerjaan baik sebagai pebisnis, wartawan, guru, dan aktivis pergerakan. Ia pernah menduduki jabatan ketua Jong Islamiyeten Bond Cabang Makassar kurun waktu 1927-1936, sebuah organisasi pemuda Islam saat itu di samping aktif berdagang pada 1922-1939.

Pada 1940-1942 Abdul Muin mengajar pada sebuah sekolah milik Muhammadiyah yaitu Sekolah Menengah Muallimin Muhammadiyah di Makassar dan tenaga pengajar pada Sekolah Menengah Muallimin H.D.S. Makassar.

Naluri politiknya pernah disalurkan lewat partai Politik sebagai Wakil Ketua PNI Cabang Makassar. Ia juga seorang jurnalis membantu beberapa harian lokal dan nasional, seperti Harian Pemberita Makassar di Makassar, Harian Bintang Timur di Jakarta, dan Suara Umum di Surabaya.

Pemerintah Jepang merekrut Abdul Muin menjadi salah seorang pegawai pada Kementerian Sinjokusjo Celebes Minsaibu di Makassar pada 1943-1946. Setelah Indonesia merdeka ia aktif sebagai pegawai di Kementerian Penerangan N.I.T. pada 1946-1950 kemudian menjadi anggota perbantuan pada Kementerian Pengajaran N.I.T. Bukan hanya itu, ia juga pernah menjadi pemimpin Majalah Budaya Subitan di bawah Kementerian Penerangan bersama M.R. Dajak. Dunia bisnis kembali dilakoni pada 1950-1956.

Beralamat di Jl. Patunngang e 124 c/9, di Makassar (mungkin yang dimaksud Jalan Pattunuang, penulis), ia kemudian pindah ke Bandung dan menjadi Anggota Konstituante dengan nomor keanggotaan 324. Pria kelahiran 2 Januari 1909 di Kabupaten Wajo hanya lulusan Sekolah Rakyat, kemudian menjadi seorang *outodidact*.

Gulam

Peran penting Gulam di NU dalam pesta demokrasi pertama di Indonesia, tahun 1955, adalah kedudukannya sebagai Sekretaris Lajnah Pemilihan Umum wilayah Sulawesi, diemban tahun 1954-1956. Kedudukannya yang lain di NU adalah anggota Majelis Konsul PB.NU Wilayah Sulawesi pada 1955-1956. Pada 1956 itu juga ia menjabat Sekretaris Umum YKBEPJ Wilayah Sulawesi. Pada tahun yang sama ia diserahi amanah selaku anggota pengganti Panitia Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar.

Pekerjaan utama Gulam adalah pedagang. Ia menjabat sebagai PPM pada Arsjad & Co. Makassar pada tahun 1944-1945 dan meneger untuk Indonesia Timur pada Trading Corp.Ltd. Jakarta. Selain

bergerak di bidang bisnis Gulam juga aktif pada organisasi kepemudaan Islam, yaitu sebagai Ketua Departemen Penerangan Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Sulawesi Selatan pada 1950-1951 di samping posisinya sebagai Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Daerah Sulawesi Selatan. Berkat posisinya di IPPI menjadi dasar ia direkrut untuk membantu angkatan perang untuk pertahanan rakyat pada 1950. Pada 1951-1952, ia menjadi anggota panitia pertimbangan (*Scerening Commisie*) KUDP Rayon III.

Lahir pada 18 Agustus 1927, di Makassar, Gulam menamatkan pendidikan dasar pada Sekolah Rakyat Gaur *Schaketschool* selanjutnya ke SMP dan SMA. Ia tinggal di Jalan Anuang Nomor 37A, Makassar.

H.S. Djamaluddin Daeng Paremma

Nama K.H. Sayyid Jamaluddin Puang Ramma Assagaf atau Puang Ramma, yang dikenal luas masyarakat Sulsel, dalam catatan Konstituante tertulis nama H.S. Djamaluddin Daeng Paremma. Lahir pada 7 Mei 1927 di Makassar usianya baru 32 tahun ketika menjadi anggota Konstituante. Alamatnya di Jalan Cenderawasih, Kampung Balang Baru, Makassar. Ia belajar di Sekolah Rakyat IV tahun sebagai pendidikan formal yang ditempuhnya. Setelah itu, ia lebih banyak menghabiskan waktunya belajar di Pesantren, di Pulau Salemo.

Kalangan NU lebih mengenal Puang Ramma sebagai salah seorang pendiri NU Sulsel. Ia juga menjadi anggota Majelis Konsul PBNU Wilayah Sulawesi pada 1953-1956. Posisi itulah yang mengantarkan dirinya menuju Konstituante hasil Pemilu Tahun 1955. Sebelumnya ia sudah terlibat dalam sebuah organisasi ulama yang disebut *Rabithatul Ulama* Sulsel pada tahun 1948. Beberapa pekerjaan dilakukan terutama kaitannya dengan bidang keagamaan, misalnya, Imam di Kampung Jongaya, Kota Makassar pada 1947-1950. Sebuah kursus tentang Agama Islam di Kampung Maricaya, Makassar

juga ia pimpin dan menjadi tenaga perbantuan Jawatan Penerangan Agama Makassar tahun 1950-1953. Jawatan militer pernah menggunakan jasanya sebagai penyumpah pada Kantor Polisi Militer Makassar pada 1952-1953. Puang Ramma juga memiliki jiwa juang dan aktif dalam gerakan kelaskaran sebagai komandan gerilya sektor kota Kesatuan Lipang Badjeng Polombangkeng pada 1945-1947.

Ny. Siti Djamrud Daeng Tjaja

Perempuan kelahiran Morowali, Sulawesi Tengah, 26 Juli 1931, ini pernah memimpin sayap organisasi wanita NU sebagai Ketua Muslimat NU Cabang Makassar pada 1953. Ia kemudian diangkat sebagai Anggota Konstituante Republik Indonesia dengan Nomor keanggotaan 37, menggantikan K.H.M. Ramli yang wafat sebelum akhir masa jabatannya di lembaga tertinggi negara tersebut. Ia hanya bertugas lebih dari setahun, yaitu dari 11 April 1958-5 Juli 1959.

Selain sebagai seorang politisi ia juga tokoh pergerakan perempuan, khususnya di Perwani Cabang Kolanadale selaku Wakil Ketua pada 1949-1952. Ia juga pernah duduk di PHBI Cabang Makassar selaku Wakil Ketua. Guru SRI 6 Tahun, Makassar (1955). aktivitas di bidang keguruan ia jalani sebagai guru SRI 6 Tahun Makassar pada 1955. Ia tinggal di Jalan Bawakaraeng No. 112 Makassar dan menempuh pendidikan dasar pada HIS 6 Tahun dan SRS 6 Tahun. Pendidikan di SMP dan SGI 4 Tahun juga diselesaikan di kota yang sama.

PENUTUP

Forum Musyawarah Syafiiyah Celebes merupakan cikal bakal tradisi *bahtsul masail* di NU Sulsel. Ulama-ulama yang kemudian dikenal sebagai pendiri NU Sulsel, seperti K.H.Ahmad Bone, dan K.H.Muhammad Ramli merupakan tokoh utama dalam Forum Ulama tersebut. Keberadaan forum ulama itu menunjukkan betapa kuat basis tradisi ilmiah yang diwadahi semangat berkumpul (*mulaqah*)

dan membahas kitab-kitab *turats* (*appalemba kittak*) yang diseminasinya dilakukan melalui kemampuan literasi dalam bentuk media modern seperti majalah. Tradisi *bahtsul masail* sayangnya tidak begitu dirasakan debutnya di kalangan para ulama NU sekarang ini, justru ketika forum itu sudah terlembagakan sebagai salah satu lajnah formal dalam NU. Penulis teringat sebuah ungkapan sufistik yang mengatakan “*dulu berkembang hakikat tanpa bentuk dan sekarang bentuk tanpa hakikat berlaku*”.

Hal lain yang dapat disimpulkan adalah kehadiran utusan NU dari Jawa pada *mulaqah* Musyawarah Ulama Syafiiyah di Kampung Wajo tahun 1938 menjadi petunjuk bahwa sudah ada kepengurusan NU di daerah ini pada tahun tersebut. kepengurusan dimaksud adalah Kepengurusan NU Cabang Makassar, yang salah seorang pengurusnya adalah (K.H.) Husain Saleh Assagaff, tercatat sebagai pengurus Syuriah NU Makassar tahun 1938.

Sebelum Pengurus Wilayah seperti dikenal sekarang, Kepengurusan NU di Sulawesi Selatan dan Tenggara sudah terbentuk berupa Majelis Konsul, yang merupakan perwakilan PBNU di daerah berdasarkan amanat Mukhtar NU ke-12 di Malang pada 1937. Hingga 1956, nama Majelis Konsul Sulawesi masih digunakan. **H.S. Djamaluddin Daeng Paremma**, misalnya menjadi anggota Majelis Konsul PB.NU Wilayah Sulawesi (1953-1956), Gulam (1955-1956); begitu juga Abdul Muin Daeng Myala. Berbeda dengan rekan-rekannya yang lain, K.H.M. Ramli menduduki jabatan sebagai Anggota Pengurus Besar Partai NU, Bagian Syuriah (31 Januari 1954). Adapun Ny. Siti Djamrud Daeng Tjaja menduduki jabatan Ketua Muslimat NU Cabang Makassar (tahun 1953). Di bawah Majelis Konsul inilah beberapa cabang di Celebes berafiliasi.

Catatan akhir untuk tulisan ini, bahwa peran politik ulama NU pada era orde lama sangat dominan. Empat di antara

tujuh tokoh NU yang duduk di Konstituante dan Parlemen merupakan tokoh yang kemudian dikenal sebagai ulama terkemuka di Sulawesi Selatan. Para Ulama itu bukan hanya merepresentasikan NU sebagai jamaah tetapi juga mereka merupakan bagian dari Pengurus NU yang tergabung dalam Majelis Konsul sebagai Jam'iyah. Hal ini wajar karena memang pada saat itu NU masih bernama Partai NU sejak keluar dari Masyumi pada 1952.

Ungkapan lama mengatakan bahwa NU sebagai Jam'iyah bergerak di semua bidang mulai A hingga Z, dalam arti urusan sosial, keagamaan hingga politik. A digambarkan sebagai urusan sosial dan Z sebagai politik. Karakter NU di Jawa menggambarkan model NU seperti itu, sementara NU di Sulsel digambarkan sebagai NU yang lahir tidak melalui proses A (NU Sosial) tetapi langsung sebagai Z (NU politik). Dengan temuan baru pada artikel ini, stigma itu tidak lagi berdasar dan dengan sendirinya gugur.

Sejak 1938, struktur NU sudah terbentuk di Makassar dan telah menarik perhatian pengurus PBNU untuk hadir di *mulaqah* ulama Syafiiyah yang dipusatkan di Kampung Wajo, Makassar pada tahun yang sama. Tokoh Ulama Syafiiyah seperti K.H.Ahmad Bone dan K.H.Muhammd Ramli merupakan ulama yang kemudian dikenal sebagai *muassis* NU Sulsel. Beberapa tahun kemudian sejumlah cabang NU di Sulawesi berdiri hampir serentak dalam rentang waktu lima tahun, yaitu tahun 1951-1955, mulai dari Makassar dan sekitarnya di Selatan hingga Tomohon dan Gorontalo di Utara.

Sebelum Pengurus Wilayah NU di Sulawesi terbentuk, PBNU menetapkan para ulama sebagai perwakilan, yang disebut Konsul NU. Konsulat mengordinasikan dan mengkomunikasikan cabang-cabang NU di daerah (kemudian dikenal kabupaten/kota) dengan PBNU. Untuk beberapa waktu lamanya pada awal berdirinya PWNU, antara Konsul dan PWNU berjalan beriringan tentu dengan pengaturan *tupoksi* masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. K. (2019a). Literasi Ulama dan Wacana Keislaman Awal Abad ke-20 di Sulawesi Selatan. *Al-Qalam*, 25(1), 201–210.
- Ahmad, A. K. (2019b). *Peran Keagamaan Ulama di Gowa dan Makassar: Haji Hijazi Daeng Nyonri dan KH.S. Husein Saleh Assagaf*.
- Ahmad, A. K. (2019c). *Peran Keagamaan Ulama di Gowa dan Makassar*.
- Ahmad, A. K. (2019d). *Ulama, Guru, dan Gallarrang: Negosiasi Islam dan Lokalitas*. Lintas Nalar.
- Daeng Paliweng, M. N. (1939). Persoalan Musyawarah Ulama Syafiiyah. *Azzikra*, 12, 351–386.
- Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 251–284.
- Parlaungan. (1956). *Tokoh2 Parlemen*. Gita C.V.
- Rambe, S. (2020). *Peletak Dasar Tradisi Berpolitik NU Sang Penggerak Nahdlatul Ulama KH. Abdul Wahab Chasbullah Sebuah Biografi*. Madani Institute.
- Ramly, AM; Ahmad, Abd. Kadir, dan M. (2006). *Demi Ayat Tuhan*. Opsi.

JURNAL MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-320
E-ISSN: 2775-068X

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Kementerian Agama

PEDOMAN PENULISAN JURNAL MIMIKRI

- ▢ Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia dalam bidang kajian yang meliputi; Sosial, Agama dan Kebudayaan;
- ▢ Artikel ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- ▢ Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

A. Sistematika Penulisan

1. Judul
2. Nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga, dan email
3. Abstrak
4. Kata kunci
5. Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajianpustaka, literatur review (tulisan terkait)
6. Metodologi
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka menggunakan aplikasi Mendeley atau Zatero
11. Lampiran (jika ada)

B. Ketentuan Penulisan

1. Judul
 - Judul ditulis dengan huruf kapital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
 - Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti analisis, studi, kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya.

- Judul mencerminkan isi artikel. Jangan menggunakan judul yang sulit dipahami;
 - Judul menggunakan (Bahasa Indonesia)
2. Nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga, dan email
 - Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul.
 - Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “dan” bukan “&”.
 3. Abstrak
 - Abstrak ditulis satu paragraf sebelum isi naskah.
 - Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.
 - Abstrak mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan, dan saran atau kontribusi tulisan;
 - Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata
 4. Kata kunci
 - Kata kunci Bahasa Indonesia (4-5 kata)
 - Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (*bold* dan *italic*)
 5. Pendahuluan
 - Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait).
 - Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst. krn. dsb. dan lain sebagainya.
 - Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya.
 - Jangan menggunakan huruf tebal, huruf yang digarisbawahi, atau huruf dengan tanda yang lain.
 - Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan.
 - Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan.
 - Kutipan harus jelas di mana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (,). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan rangkap (“”).
 - Penulisan acuan menggunakan *innote*, contoh Arifuddin Ismail (2014:88) atau (Arifuddin Ismail, 2014: 99).
 6. Metodologi
 - Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penulisan artikel

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan intepretasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel atau gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
- Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
- Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian *header* dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif.
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi.

Contoh Penyajian Tabel:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Total	Pemeluk Agama				
			Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1	Balikpapan Barat	88,288	83,030	2,549	777	96	1,836
2	Balikpapan Utara	120,265	109,710	7,376	2,046	350	783
3	Balikpapan Timur	63,653	59,419	3,423	669	61	81
4	Balikpapan Tengah	108,513	93,942	11,164	1,716	243	1,448
5	Balikpapan Selatan	215,265	186,212	20,417	5,070	923	2,634
	Jumlah	595,975	532,313	44,929	10,278	1,673	6,782

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2011

Contoh Penyajian Gambar:

Gambar 1. Masjid Shital Mustaqiem



Sumber: Dokumen Masjid Shital Muataqiem Samarinda, 2012

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan

9. Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih berisi wujud penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel minimal 15 (buku, jurnal nasional dan International). Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi. Kalau tidak ada nama keluarga, nama ditulis seadanya.
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring. Judul artikel ditulis di antara tanda kutip („,”) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring. Jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit.
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.).
- Menggunakan aplikasi Mendeley atau Zatero

Contoh buku:

Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita. Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.

Contoh artikel:

Budiman, Manneke. 2011. „Ethnicity and the performance of identity“, Wacana 13/2.
Ricklefs, M.C. 2008. „Religion, Politics and Social Dynamics in Java: Historical and Contemporary Rhymes“, dalam: Greg Fealy dan Sally White (eds) *Expressing Islam. Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

C. Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan sebanyak 2 rangkap dan *softcopy* berupa file. File bisadikirim melalui link OJS [:Mimikri](#).
- Artikel yang dikirim **wajib** dilampiri biodata ringkas dan surat pernyataan keaslian tulisan.
- Penulis yang menyerahkan artikelnya harus menjamin bahwa naskah yang diajukan tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan atau telah diterima untuk dipublikasi oleh jurnal lainnya.
- Kepastian naskah dimuat atau tidak, akan diberitahukan secara tertulis. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri:

**Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Kementerian Agama**

Jalan A.P.Pettarani No.72 Makassar

Kontak Pimpinan Redaksi

Nasrun Karami Alboneh : 081355661118/ Nur Saripati Risca: 081244164526

E-mail: mimikrijurnal@gmail.com

Makassar, 17 Januari 2022
Pemimpin Redaksi

Nasrun Karami Alboneh